

Dimensi Politik dalam Kisah Al-Qur'an

Yusuf Baihaqi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: baihaqi_yusuf@yahoo.com

Abstract

There are many dimension in the content of the Qur'an. One of those dimension is the political dimension. The existence of verses that explicitly explain how the relationship of the leaders and their people, direct interaction of prophets and the role of the era, strengthen relationship of Islam and politics that can't be separated. This research focus on a discussion about the political dimension in the verses of Qur'an and the real form of political dimension from the content of in the holy Qur'an. This research is based on the theory that the holy Qur'an was revealed as a direction for human one of the example is the figure of prophet Muhammad as an ideal figure of leader who grounded egalitarian values among the people he led. While the figure of the Pharaoh (Fir'aun) is real occurrence of the dictatorship of a leader. As prophet Sulayman as exemplified his firm attitude of being a leader.

Key Word: *Story, al-Qur'an, politic*

Abstrak

Ada banyak dimensi dalam kandungan kisah al-Qur'an, dan dimensi politik merupakan salah satunya. Keberadaan sejumlah ayat yang secara eksplisit menerangkan bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, interaksi langsung para nabi dengan para penguasa zamannya, menguatkan relasi antara Islam dan politik yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian ini fokus pada pembahasan seputar dimensi politik dalam kisah al-Qur'an. Tentang Bagaimana hubungan antara politik dan al-Qur'an, dan bentuk kongkrit semacam apa yang berdimensi politik dari kandungan kisah dalam al-Qur'an, Penelitian ini berlandaskan teori bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia (hudan li al-nâs). Sebagaimana Sosok nabi Muhammad saw merupakan sosok ideal dari seorang pemimpin yang membumikan nilai-nilai egaliter diantara rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan Sosok Fir'aun merupakan gambaran nyata dari kediktatoran seorang pemimpin. Sebagaimana nabi Sulaiman as yang mencontohkan sikap tegas menjadi seorang pemimpin.

Kata Kunci: *Kisah, al-Qur'an, Politik*

Pendahuluan

Dalam kajian Al-Qur'an, ayat-ayat kisah memiliki peranan yang sangat vital, baik dari sisi keberadaan maupun dari sisi ruang. Dari sisi keberadaan, kisah merupakan bagian dari media yang kerap digunakan oleh al-Qur'an untuk menanamkan pelajaran bagi para pembacanya. Adapun dari sisi ruang, kita dapatkan kuantitas ruang yang dimiliki oleh ayat-ayat kisah dalam al-Qur'an yang mencapai sepertiga bahkan lebih dari jumlah ayat al-Qur'an secara keseluruhan.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dinamika kehidupan politik yang sangat dinamis pada abad modern ini, menuntut kita untuk mengkaji lebih mendalam seputar dimensi politik dalam kisah al-Qur'an, hal ini dikarenakan karakteristik yang di miliki oleh al-Qur'an itu sendiri adalah ia bersifat universal dan komprehensif.

Mengkaji dimensi politik dalam kisah al-Qur'an, akan membuka wasasan kita dan menuntut kita untuk mendalami sisi lain dari pemaparan sebuah kisah dalam al-Qur'an, tidak sebatas sisi historis sebagaimana yang menjadi konsentrasi banyak dari kalangan para mufassir dan pengkaji al-Qur'an selama ini.

Mengkaji sisi historis dari kisah al-Qur'an adalah penting, akan tetapi secara berlebihan mengkaji kisah al-Qur'an dari sisi historisnya semata, kerap kali menjebak para mufassir dan pengkaji al-Qur'an dalam lingkaran riwayat *Isrâ'iliyyât* bahkan riwayat *Maudhû'ât*. Sebuah lingkaran yang semestinya dihindari oleh para mufassir dan pengkaji al-Qur'an, dikarenakan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan dari mengaitkan kisah al-Qur'an, baik dengan riwayat *isrâ'iliyyât* maupun dengan riwayat *maudhû'ât*.¹

Tidak ada yang tabu, bahkan tidak ada yang harus dikhawatirkan dari upaya kita untuk menguak lebih mendalam dimensi politik dalam kisah al-Qur'an, dikarenakan politik sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama,² dan al-Qur'an merupakan kitab suci yang sarat dengan tuntunan bagaimana sebuah masyarakat yang baik semestinya terbentuk, sebagaimana al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana cara terbaik

¹ Muhammaad bin Muhammad Abu Syahibah, *al-Isrâ'iliyyât Wa al-Maudhû'ât Fî Kutub al-Tafsîr*, Cairo, Maktabah al-Sunnah, 1408 H, hal. 9

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/politik>

untuk merubah sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang baik.³

Lebih daripada itu semacam pernyataan *lâ Sya'na li al-dîn bi al-siyâsah* (tidak ada kaitan agama dalam politik), merupakan sebuah pernyataan yang menurut Ilal Al Fasi -seorang pemimpin berkebangsaan Maroko- sebagai sebuah *al-isrâ'iliyyât al-jadîdah* (*isrâ'iliyyât* baru), yang masuk dan turut mengkontaminasi pandangan masyarakat muslim dewasa ini. sebuah pernyataan yang menginginkan agama sebatas dijalankan di dalam masjid.⁴

Politik dalam salah satu definisinya juga merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, interaksi para nabi dengan sejumlah tokoh politik dari kalangan para penguasa yang diabadikan dalam al-Qur'an, menegaskan sesungguhnya tidak dikenal dalam Islam dikotomi antara agama dan politik.

Penelitian ini fokus pada pembahasan seputar dimensi politik dalam kisah al- Qur'an. Tentang Bagaimana hubungan antara politik dan al-Qur'an? Dan Bentuk kongkrit semacam apa yang berdimensikan politik dari kandungan kisah dalam al- Qur'an?

Penelitian ini berlandaskan teori bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia (*hudan li al-nâs*).⁵ Petunjuk yang dimaksud, bukanlah sebatas petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan beragama semata, melainkan juga petunjuk bagi umat manusia dalam artian yang lebih luas, seperti: petunjuk bagi mereka dalam menjalankan misinya sebagai makhluk yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi ini, dimana melakukan interaksi sosial dan politik merupakan sebuah keniscayaan.

Ayat-ayat kisah dalam al-Qur'an menempati porsi sepertigaan kandungan al- Qur'an, keberadaan ayat-ayat kisah dalam al-Qur'an memiliki beragam dimensi, salah satunya adalah: dimensi politik, dikarenakan tujuan diabadikannya sejumlah kisah dalam al-Qur'an tidaklah sebatas untuk tujuan pemaparan dimensi historis semata, melainkan juga sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat manusia (*'ibratun li'ulil albâb*) QS. Yusuf(12): 111.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِيقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

³ Abd Al Shobur Marzuq, *Manhajiyah Al Taghyîr Al Ijtima'î*, Cairo: Dar Al Rasyad, 1998 M, hal. 12.

⁴ Fahmi Huwaidi, *Al Qur'an Wa Al Sulthân*, Cairo: Dar Al Syuruq, 1999 M, hal. 123.

(Q.S. An Nahl [١٦]: ٨٩) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ .

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Kisah Al-Qur'an

Kisah secara etimologi terambil dari kata *qashsha yaqushshu*, dikatakan *qashsha al-syai'a* berarti: *tatabba`a atsarahu* (mengikuti jejaknya). Dan *qashsha al-qishshata*, berarti: *rawâhâ* (meriwayatkannya). *al-qishshah*, berarti: *al-khabar* (cerita).⁶

Al-qishshah secara terminologi bisa didefinisikan dengan *hikâyah natsriyyah thawîlah tustamaddu min al-khayâl aw al-Wâqi` am minhuma ma`an wa tubnâ `alâ al-qawâ'id al-mu`ayyanah min al-fann al-kitâbi* (cerita panjang yang berbentuk prosa, bersumber dari daya imajinasi atau realita atau dari keduanya, dan dibangun berdasarkan kaedah tertentu dari seni menulis).⁷

Dalam hemat kami, definisi *al-qishshah* tersebut untuk diterapkan pada kisah-kisah yang ditulis oleh manusia tidaklah bermasalah, akan tetapi untuk dinisbatkan kepada kisah al-Qur'an, dalam hemat kami definisi diatas kurangnya tepat.

Kekurangtepatan definisi *al-qishshah* diatas untuk dinisbatkan kepada kisah al-Qur'an, dikarenakan kisah al-Qur'an merupakan bagian dari firman Allah swt, dan semua firman Allah swt merupakan kebenaran, tidak terkandung sedikitpun di dalamnya kebohongan.

Tidak semua kisah al-Qur'an dikisahkan secara panjang lebar dan utuh apalagi berdasarkan kronologis kejadiannya, seperti: kisah nabi Yusuf as yang diabadikan dalam surah Yusuf dalam 99 ayat.

Ada banyak dari kisah yang dikisahkan oleh al-Qur'an, sebatas potongan-potongan penting dari kisah tersebut, untuk dijadikan pelajaran bagi manusia yang membaca kisahnya, seperti: kisah Qarun yang diabadikan dalam surah al-Qashash dalam 8 ayat.

Atau bahkan al-Qur'an dalam kisahnya sebatas menyebut tokoh kisah dalam sebuah kalimat sisipan, diantara pemaparan

⁶ Ibrahim Anis, *Al Mu`jam Al Wasith*, Cairo: Majma` Al Lughah Al `Arabiyyah, hal. 774.

⁷ Ibrahim Anis, *Al Mu`jam Al Wasith*, hal. 774.

kisah-kisah yang lain, seperti: disisipkannya sekilas tentang sosok nabi Idris as yang diabadikan dalam surah Maryam hanya dalam 2 ayat.

Sejumlah fenomena diatas, lebih dari cukup untuk memberikan sisi perbedaan antara kisah Al-Qur'an dengan kisah lainnya yang dibikin oleh manusia.

Al-Qur'an dan Politik

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau latin *Politicos* atau *Politicus* yang berarti *relation to citizen* (hubungan dengan rakyat).⁸ Atas dasar itulah, seorang politikus semestinya dia memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat, karena keberadaannya dalam sebuah lembaga politik merupakan representasi rakyat dan jembatan antara rakyat dan pemimpinnya.

Merujuk kepada asal muasal kata politik diatas, politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.⁹

Politik ada dua macam, yaitu: *Pertama*, politik yang adil, yang mengeluarkan kebenaran dari kezhaliman. Sebuah praktek politik yang menyejahterakan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, politik zhalim, sebuah praktek politik yang berdasarkan hawa nafsu semata, dan sebuah praktek politik yang tidak memperdulikan kemudharatan dan kerusakan yang menimpa umat, praktek politik semacam ini tentunya diharamkan oleh syariat.¹⁰

Politik Islam merupakan sebuah praktek politik yang lebih mendekatkan manusia kepada kemaslahatannya, dan menjauhkannya dari kerusakannya, walaupun tidak secara langsung disyariatkan atau diturunkan wahyu berkenaan dengannya.¹¹

Atas dasar itulah, terdapat perbedaan yang mendasar antara

⁸ Quraish Shihah, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 548.

⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 9-10.

¹⁰ Abdul Aziz Izzat Al Khayyath, *Al Nizhâm Al Siyâsî Fî Al Islâm*, Cairo: Dar Al Salam, 1999 M, hal, 23.

¹¹ Muhammad Imarah, *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, Cairo: Mathba`ah Al Azhar, 1992 M, hal. 14.

politik Islam yang berorientasikan dunia dan akhirat.¹² Dengan politik sekuler yang hanya berorientasikan dunia semata, karena politik sekuler sebatas mengurus manusia yang berorientasikan duniawi, untuk kehidupan duniawinya, guna mencapai tujuan duniawi semata.¹³

Seorang politikus Islam akan memposisikan dirinya sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini, sehingga menjadi keharusan baginya untuk tunduk di bawah syariat dalam menjalankan semua aktifitas politiknya. Sebaliknya politikus sekuler, dia akan memposisikan dirinya sebagai pemilik dunia, sehingga dengan selera dan keinginannya, tanpa tunduk di bawah syariat, dia menjalankan segenap aktifitas politiknya.¹⁴

Islam sebagai sebuah ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, tidaklah bisa dipisahkan dari keterkaitan dengan kekuatan yang berkuasa di era para nabi-nabi tersebut. Al-Qur'an dalam banyak kisahnya mengabadikan kepada kita, seputar interaksi para nabi dengan para penguasa zamannya.

Contoh: Interaksi antara nabi Ibrahim as dengan raja Namrud, seorang raja negeri Babilonia yang hidup semasa dengan nabi Ibrahim as, seputar hakekat Tuhan yang diseru oleh nabi Ibrahim as dalam Q.S. Al Baqarah (2): 258.:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“(Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberikannya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, “Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan,” dia berkata, “Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata, “Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang

¹² Muhammad Imarah, *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, hal. 22.

¹³ Muhammad Imarah, *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, hal. 19.

¹⁴ Muhammad Imarah, *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, hal. 26.

zalim.)”

Interaksi yang dilakukan oleh nabi Ibrahim as diatas, membuktikan bahwasannya ada kaitan antara ajaran yang dibawa oleh para nabi dengan kekuasaan. Lebih-lebih lagi ketika kekuasaan disalahgunakan oleh para penguasa, maka para nabi diutus dalam rangka untuk meniadakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Kekuasaan yang terjadi pada masa nabi Ibrahim as disalahgunakan untuk memaksa manusia untuk menyembah berhala, nabi Ibrahim as datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu penyembahan berhala, gesekan pun terjadi antara raja Namrud dengan nabi Ibrahim as, sampai pada akhirnya nabi Ibrahim as keluar dari negeri Babilonia.

Fenomena interaksi antara para nabi dengan para penguasa zamannya, membuktikan bahwasannya antara Islam dengan politik tidaklah bisa dipisahkan. Dan tidaklah benar paham yang diupayakan oleh kalangan Imperialis, ketika mereka berkuasa atas negeri Muslim, bahwasannya Islam sebatas ajaran agama yang tidak bersinggungan dengan kekuasaan.

Secara eksplisit, keterkaitan antara Islam dengan politik bisa kita baca pada dua ayat dalam Q.S. Al Nisa' (4): 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kandungan Ayat pertama (Al Nisa' [4]: 58) ditujukan kepada

para pemegang kekuasaan, dimana mereka dituntut untuk terus menjaga amanat kekuasaan yang diembankan kepada mereka, juga mereka diingatkan oleh ayat tersebut untuk terus bersikap adil. Sesungguhnya ketika amanat dan sikap adil itu hilang dari diri para pemegang kekuasaan, maka itu menjadi pertanda kehancuran umat yang dipimpinnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits:

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعته يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“Apabila amanat telah dihilangkan maka tunggulah saat kiamat tiba. Bagaimana cara menghilangkannya wahai rasulullah? Dia menjawab: apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah saat kiamat tiba.”¹⁵

Adapun kandungan Ayat kedua (Al Nisa’ [4]: 59) ditujukan kepada para pengikut yang dipimpin dari kalangan orang yang beriman, dimana mereka dituntut untuk menaati para pemegang kekuasaan (Ulul Amri), dengan syarat apabila mereka (Ulul Amri) merupakan bagian dari mereka. Ketaatan inipun diperuntukkan kepada mereka, setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasul-Nya, dikarenakan tidak ada ketaatan yang diperuntukkan kepada makhluk diatas kemaksiatan kepada sang Khaliq, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits:

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل

“Tidak ada kepatuhan yang diperuntukkan untuk makhluk diatas kedurhakaan kepada Allah swt.”¹⁶

Pesan dari kedua ayat diatas barulah dapat direalisasikan dalam wujud nyata, apabila orang Islam memiliki sebuah negara yang berkuasa, sehingga ditaati oleh segenap penduduknya, dimana ketidakberadaannya, menjadikan pesan yang terkandung dalam dua ayat tersebut menjadi sebatas utopia belaka.

Dua ayat diatas tanpa ada sedikit keraguan merupakan bagian dari sejumlah ayat dalam Al-Qur’an yang menegaskan adanya keterkaitan antara Islam dan politik, bahkan betapa dalam

¹⁵ Bukhari, *Shahîh Al Bukhârî*, No Hadits. 6015, (<http://www.al-islam.com>).

¹⁶ Ahmad, *Musnad Ahmad*, No Hadits. 1041, (<http://www.al-islam.com>).

dan luaskan kandungan makna yang dapat diurai dari kedua ayat tersebut, Ibnu Taimiyyah secara khusus mengarang satu buku yang berjudul *al-siyâsah al-syar`iyyah fi ishlâh al-Râ`î wa al-ra`iyyah*.¹⁷

Upaya pengaburan seputar kaitan antara Islam dan politik, ternyata bukan saja dilakukan oleh kalangan eksternal, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan imperialis terhadap bangsa yang dijajahnya. Bahkan fenomena ini juga kita dapatkan di kalangan internal umat Islam.

Syaikh Ali Abdul Raziq (1887-1966 M) pada tahun 1925 M menulis satu buku yang ia beri judul *al-islâm wa ushûl al-ḥukm*. Dalam bukunya tersebut, beliau menulis sekularisme Islam, dalam artian: tidak adanya keterkaitan antara Islam dengan politik dan kekuasaan. Beliau menafikan bahwasannya Rasulullah saw telah mendirikan satu sistem pemerintahan pada masanya. Islam sebatas risalah agama murni, sebagaimana agama-agama sebelumnya. Demikian pula nabinya, kapasitas beliau murni sebagai pendakwah bagi sebuah agama, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak ada kaitan antara politik dan Islam. Sehingga tidak ada pemerintahan yang dibangun oleh para nabi, sebagaimana apa yang diseru oleh para nabi tidak ada yang berkaitan dengan politik.¹⁸

Itu beberapa pokok pemikiran Syaikh Ali Abdul Raziq dalam bukunya *al-islâm wa ushûl al-ḥukm* yang sempat menjadi viral dan menghebohkan dunia akademis seputar kajian keislaman, saat kemunculannya.

Seorang Ulama besar berkebangsaan Mesir yang bernama Muhammad Al Khidr Husain (1876-1958 M) secara khusus menulis satu buku yang menyanggah pemikiran Syaikh Ali Abdul Raziq, yang dia beri judul *naqd kitâb al-islâm wa ushûl al-ḥukm*.

Diantara sanggahan Muhammad Al Khidr Husain dalam bukunya tersebut: Terminologi *al-khilâfah*, *al-imâmah* dan *ad-daulah* bukanlah bagian dari pokok ajaran agama (*ushûl al-dîn*), bukan pula bagian dari rukun dan aqidah agama, melainkan ia bagian dari cabang agama (*furû` al-dîn*),¹⁹ atas dasar itulah, tidak bisa dijadikan

¹⁷ Yusuf Al Qaradawi, *Min Fiqh Al Daulah Fi Al Islâm*, Cairo: Dar Al Syuruq, 1999, hal. 15.

¹⁸ Muhammad Imarah, *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, hal. 86-87.

¹⁹ Hal ini tentunya sangat berseberangan dengan paham kalangan syi'ah yang menganggap bahwasannya Terminologi *Al Khilâfah*, *Al Imâmah* dan *Al Daulah* merupakan bagian dari pokok ajaran agama (*Ushûl Al Dîn*). Dan menempati urutan

sebagai argumen untuk menguatkan paham sekularisme Islam, hanya dikarenakan tidak didapatkannya terminologi *al-khilâfah*, *al-Imâmah* dan *al-Daulah* dalam redaksi ayat Al-Qur'an, dikarenakan pembahasan seputar cabang agama tidaklah menjadi keharusan dalam kandungan Al-Qur'an.²⁰

Sanggahan Muhammad Al Khidr Husain seputar konsep bernegara sangat mencerminkan paham moderat, sebuah paham yang diwarisinya dari para Ulama terdahulu dari kalangan *Ahlus Sunah wal Jama'ah* yang tentunya berseberangan dengan paham kalangan Sekuler yang berupaya untuk memisahkan agama dari kekuasaan, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan juga tidak sependapat dengan paham yang berupaya untuk mendirikan *al-daulah al-dîniyyah* (negara agama), dimana para penguasanya dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan putusnya dianggap sebagai bagian dari putusan Tuhan yang tidak bisa dibantah dan juga dikritisi.

Sejarah Islam tidak mengenal istilah "Penguasa merupakan bayang-bayang Tuhan di bumi", atau adanya hubungan khusus antara penguasa bumi dengan penguasa langit, dan melebihi hubungannya dengan seorang rakyat biasa. Semenjak berakhir turunnya wahyu, yang ditandai dengan kewafatan Rasulullah saw, berakhir pula untuk selamanya lembaran hubungan khusus antara penghuni bumi dengan penguasa langit, sehingga setelahnya setiap penghuni bumi ditantang untuk mendirikan agama dan memakmurkan dunia dengan nalarnya.²¹

Disamping bantahan yang disampaikan oleh Muhammad Al Khidr Husain atas pemikiran Syaikh Ali Abdur Raziq dalam bukunya *al-islâm wa ushûl al-hukm*, pandangan yang menguatkan bahwasannya antara Islam dan politik tidaklah bisa dipisahkan juga kita dapatkan dalam eksternal kalangan umat Islam yang mempelajari Islam, diantaranya:

ketiga, setelah ketauhidan dan kenabian. Sehingga pembahasan seputar *Al Khilâfah*, *Al Imâmah* dan *Al Daulah* dalam pandangan kaum Syi'ah bukanlah bagian dari ijtihad para Ulama. Sebaliknya kita dapatkan kalangan Sunni memasukan pembahasan *Al Khilâfah*, *Al Imâmah* dan *Al Daulah* dalam kajian fiqh, dan dimungkinkan bagi seorang mujtahid untuk berijtihad seputarnya. Lihat: Fahmi Huwaidi, *Al Qur'an Wa Al Sulthân*, hal. 130.

²⁰ Muhammad Imarah, *Naqd Kitâb Al Islâm Wa Ushûl Al Hukm Li Syaikh Al Islâm Muhammad Al Khidr Husain*, Cairo: Dar Nahzhah, 1998 M, hal. 44.

²¹ Fahmi Huwaidi, *Al Qur'an Wa Al Sulthân*, hal. 133.

C. A. Nallino, "Sesungguhnya Muhammad telah mendirikan agama, dan dalam waktu yang bersamaan, ia juga mendirikan negara".

Dr. Schacht, "Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencakup sejumlah teori hukum dan politik, secara umum Islam merupakan sebuah sistem komprehensif dari sebuah kebudayaan yang mencakup agama sekaligus negara".

D.B. Macdonald, "Disini, yakni: kota Madinah, negara Islam pertama terbentuk, dan pondasi dasar bagi hukum Islam diletakkan".²²

Beberapa komentar diatas yang terlontar dari kalangan eksternal umat Islam, sejatinya menguatkan keterkaitan antara Islam dan politik, sehingga sangatlah mencengangkan kalau ada seorang tokoh di internal umat Islam semisal Syaikh Ali Abdul Raziq yang meragukan keterkaitan antara Islam dan politik.

Sangat sulit memisahkan antara Islam dan politik, Mahmud Syaltut dalam bukunya *Min Taujihât al Islâm* sebagaimana yang dikutip oleh seorang wartawan senior Mesir yang bernama Fahmi Huwaidi mengatakan, "Sangat sulit dalam Islam, untuk membedakan antara agama semata, atau politik semata. Semua yang berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah merupakan agama, hal ini juga dimungkinkan untuk dikategorikan sebagai politik Islam dalam pendidikan dan akhlak. Semua yang berkaitan dengan *Mu`âmalât* (interaksi sosial) merupakan agama, hal ini juga dimungkinkan untuk dikategorikan sebagai politik Islam dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan semua yang berkaitan dengan hukum dan urusan duniawi Muslim juga merupakan bagian dari agama, hal ini juga dimungkinkan untuk dikatakan sebagai sistem Islam dalam urusan hukum dan administrasi negara. Demikian adanya keterkaitan yang erat antara urusan agama dan urusan negara. Seperti halnya kaitan antara pondasi sebuah bangunan dengan bangunan diatasnya. Agama merupakan pondasi bagi sebuah negara. Dan tidak mungkin tergambarkan konsep negara Islam tanpa agama. Sebagaimana tidak mungkin tergambarkan agama Islam minus politik negara."²³

²² Yusuf Al Qaradhawi, *Min Fiqh Al Daulah Fî Al Islâm*, Hal. 27-28.

²³ Fahmi Huwaidi, *Al Qur'ân Wa Al Sulthân*, Hal. 128.

Politik Dalam Kisah Al-Qur'an

Egalitarianisme Kepemimpinan Rasulullah saw

Egalitarianisme atau pandangan yang menyatakan bahwasannya manusia itu ditakdirkan sama derajat, merupakan salah satu karakter penting yang dimiliki oleh politik Islam.²⁴ Dalam banyak sistem di luar Islam, praktek diskriminasi masih kerap terjadi, hal semacam ini yang coba dikikis habis oleh Rasulullah saw, tanpa memandang asal muasal, suku dan agamanya.

Ada banyak kisah teladan seputar egalitarianisme kepemimpinan Rasulullah saw, diantaranya yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah kisah salah seorang dari kalangan Bani Zhafr yang bernama Thu'mah, ketika ia mencuri baju besi tetangganya dan menaruhnya di karung gandum. Dikarenakan karung gandumnya sobek, maka gandum pun berceceran di sepanjang jalan yang dilalui olehnya. Thu'mah kemudian menyembunyikan barang curiannya di salah seorang Yahudi. Ketika baju besi curian tersebut dicari di rumah Thu'mah, tidak didapatkan dan Thu'mah pun bersumpah bahwasannya ia tidak mencurinya. Singkat cerita, baju besi curian ditemukan di rumah orang Yahudi tersebut berdasarkan petunjuk tumpahan gandum, Yahudi pun mengatakan bahwa Thu'mah lah yang menitipkan baju besi itu kepadanya. Tidak terima dengan penjelasan Yahudi, sekelompok orang dari kalangan Bani Zhafr melakukan pembelaan terhadap Thu'mah dan menuduh Yahudi tersebut yang mencurinya. Perselisihan dan pembelaan yang dilakukan oleh kalangan Bani Zhafr pun berakhir dengan turunnya surat Al Nisa' [4]: 107-108 yang menginformasikan kejadian yang sebenarnya. Thu'mah pun dikisahkan kemudian melarikan diri ke kota Makkah, berpindah agama dan menetap di sana sampai akhir hidupnya.²⁵

²⁴ Abdul Aziz Izzat Al Khayyath, *Al Nizhâm As Siyâsi Fî Al Islâm*, Hal, 83.

²⁵ Muhammad Ali Al Shobuni, *Shafwat Al Tafâsîr*, Cairo: Dar Al Shobuni, 1980 M, hal. 299.

Dalam Q.S. Al Nisa' (4): 107-108 relah menjelaskan:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ
الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

“Dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan”.

Masa disaat rasulullah saw diutus, ketimpangan sosial merajalela dimana-mana. Kehormatan dan kemuliaan seseorang lebih ditentukan oleh status sosialnya bukan perilaku dan kepribadiannya.

Disamping ketidakadilan sosial yang merajalela, praktek perbudakan pun marak terjadi. Peperangan yang kerap terjadi diantara bangsa Arab, mendorong pihak pemenang kerap kali menjadikan pihak yang kalah sebagai budak mereka. Disamping hegemoni pihak kuat atas pihak lemah, kasus penculikan yang berujung kepada lahirnya praktek perbudakan pun masih kerap terjadi.²⁶

Berkaitan dengan praktek perbudakan, Islam walaupun secara lugas tidak menghapus praktek perbudakan, akan tetapi sistem yang dibangun oleh Islam sangat memungkinkan untuk menghapus segala bentuk praktek perbudakan di muka bumi ini. Sehingga dengannya dapat dipahami bahwasannya secara tidak langsung sejatinya Islam menginginkan agar praktek perbudakan ini tidak lagi berlaku di muka bumi ini.

Kenapa Islam tidak menghapus praktek perbudakan secara tegas? Terdapat dua kemungkinan yang dapat menjawab pertanyaan ini:

Pertama, dalam rangka “perlakuan sama”. Dimungkinkan terjadi peperangan antara Muslim dan non Muslim, dimana pihak non Muslim ketika mereka menghalalkan praktek perbudakan

²⁶ Ahmad Syalabi, *Al Islâm*, Cairo: Maktabah An Nahzhah, 1997 M, Hal. 232.

atas tawanan Muslim, Islam mentolerir perlakuan yang sama atas tawanan non Muslim.

Kedua, diantara cara yang digunakan Islam dalam menghapus dan meniadakan sebuah permasalahan adalah dengan cara pelan dan berangsur, mengenai sasaran tanpa menimbulkan gejolak. Pengharaman *khamar* (minuman yang memabukkan), pengharaman praktek ribawi, dan masalah perbudakan merupakan sejumlah contoh kongkrit akan hal ini. Berbeda dalam kasus yang bersifat prinsipil dan tidak ada toleransi di dalamnya, seperti: ajaran tauhid dan peninggalan sembah selain Allah swt. Para nabi, dari semenjak masa awal kenabian, tema-tema seputar ketauhidan merupakan tema-tema awal yang mereka sampaikan kepada umat mereka, tanpa toleransi dan kompromi.

Menurut Ahmad Syalabi, cara yang secara tidak langsung digunakan oleh ajaran Islam dalam rangka meniadakan praktek perbudakan di muka bumi ini adalah, *Pertama*, dengan cara *Tadhyiq Al Madkhal* (menyempitkan pintu masuk). *Kedua*, dengan cara *Tausi' Al Makhraj* (memperluas pintu keluar).

Ada berbagai macam pintu masuk dari maraknya praktek perbudakan di muka bumi ini, seperti: jual beli manusia, perjudian, penculikan, hutang piutang, kasta, peperangan dll. Islam menutup rapat-rapat semua pintu masuk yang memungkinkan terjadinya praktek perbudakan tersebut, kecuali satu pintu, yakni: peperangan.

Dalam konteks kekinian sangat sulit peperangan terjadi, karena bukan sebatas peperangan, melainkan peperangan yang disebabkan karena faktor agama, itupun dengan syarat kalau yang menjadi tawanan adalah non Muslim, artinya: tidak berlaku kalau tawanan tersebut muslim, walaupun ia berada di pihak lawan.

Ini merupakan bagian dari cara *tadhyiq al-madkhal* yang ditawarkan oleh Islam dalam menghapus praktek perbudakan. Disamping masih banyak cara lain yang juga sudah dikenalkan oleh Islam, seperti: pertukaran tawanan, pembebasan tawanan tanpa syarat dan penerimaan tebusan atas tawanan.

Sebagaimana dalam Q.S. Muhammad (47): 4:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَسْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن
لَّيَبْلُو بِبَعْضِكُمْ بَبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”.

Adapun bagian dari cara *tausi` al-makhrāj* yang ditawarkan oleh Islam untuk mengembalikan kemerdekaan seseorang atau menjadikan seseorang merdeka adalah dengan menjadikan upaya memerdekakan hamba sahaya sebagai sebuah anjuran dalam beragama, yang berimbas kepada perolehan ganjaran yang berlipat di sisi Allah swt.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Balad (90): 11-13:

فَلَا أَقْتَحَمُ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُنْ رَقَبَةً ۖ

“Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,”

Cara lain yang juga ditawarkan oleh ajaran Islam dalam rangka untuk meminimalisir bahkan meniadakan praktek perbudakan, adalah dengan menjadikan “memerdekakan hamba sahaya” sebagai salah satu opsi yang ditawarkan guna menjadi tebusan atas pengguguran sebuah sumpah atau atas sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Ma'idah (5): 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْهُوَ إِيَّاهُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan

yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".

Dan Q.S. Al Nisa' (4): 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) [334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ketika seorang hamba sahaya hendak memerdekakan dirinya dengan cara membayar, Islam pun memerintahkan para tuan untuk melakukan kesepakatan dengan mereka. Bahkan setelah kesepakatan itu ditandatangani, Islam dalam waktu yang bersamaan memerintahkan para tuan untuk memberikan bantuan materi kepada para budak mereka.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Nur (24): 33

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ
 اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ نَحْصِنَا لَتَبْتَغُوا
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Bahkan dalam rangka untuk mempercepat proses pembayaran kepada tuannya, Islam mengkatagorikan para budak sebagai salah satu dari delapan kelompok yang berhak mendapatkan distribusi dana zakat.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Rasulullah saw dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi dan pemimpin negara, tidak pernah melakukan praktek diskriminasi diantara umat dan rakyat yang dipimpinya. Sebagaimana sejarahpun mencatat, tidak pernah semasa hidupnya, beliau menjadikan seorang

merdeka sebagai hamba sahaya, walaupun sejumlah peperangan dijalani oleh beliau, dan sejumlah tawanan didapat melalui sejumlah peperangan tersebut. Sebaliknya egalitarianisme sangat tampak sekali dalam gaya kepemimpinan beliau.

Kapasitas Muhammad sebagai pemimpin negara dan nabi dalam waktu yang bersamaan, tidaklah disalahgunakan oleh beliau untuk bersikap otoriter, sebaliknya dalam berbagai urusan duniawi, dimana tidak diturunkan wahyu kepadanya, rasulullah saw kerap mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, bahkan secara terus terang rasulullah saw menyampaikan kepada para sahabatnya, kemungkinan pengetahuan mereka seputar dunia yang lebih mumpuni dibandingkan dengan beliau:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

(Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian).²⁷

Diktatorisme Kepemimpinan Fir`aun

Diktatorisme adalah sebuah paham yang dianut oleh negara/pemerintahan untuk dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut.²⁸ Beberapa ciri yang melekat dalam sebuah sistem kepemimpinan yang diktator adalah: (1) mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan yang melekat dalam dirinya, (2) menganggap dirinya paling berkuasa, (3) keputusan-keputusan yang diambil secara sepihak, tidak mengenal kompromi, (4) keras dalam menghadapi prinsip.²⁹

Membaca beberapa ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin diktator, sangat pas kalau kita katakan bahwasannya sosok Fira'un yang hidup semasa dengan nabi Musa as yang kisahnya diabadikan dalam banyak ayat Al-Qur'an, merupakan sosok pemimpin yang paling diktator yang pernah berkuasa di muka bumi ini.

Indikasi kuat akan kediktatoran Fir'aun bisa kita baca dalam sejumlah ayat kisah dalam Al-Qur'an, yang mengabadikan sejumlah pernyataannya semasa kepemimpinannya:

Pertama, ketika nabi Musa as mendakwahi Fir'aun untuk mengimani Tuhan pencipta alam semesta ini, Fir'aun dengan tentara

²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, No Hadits. 4358, (<http://www.al-islam.com>).

²⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diktator>

²⁹ Rahman Afandi, *Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam*, (Jurnal Insania, Vo. 18, No. 1, Januari-April 2013).

yang dimilikinya mengumpulkan rakyatnya seraya mengklaim di hadapan rakyatnya bahwasannya dia bukan saja sebatas seorang raja bagi rakyatnya, melainkan Tuhan bagi mereka, bahkan Tuhan yang tertinggi.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Nazi`at (79): 24.

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

“(seraya) berkata:” Akulah Tuhanmu yang paling tinggi”.

Kedua, ketika Fir`aun dalam posisi terpojok dalam sebuah dialog sengit antara dirinya dengan nabi Musa as seputar Tuhan yang mengutus nabi Musa as, Fir`aun pun dengan murka mengancam Musa as hendak memasukkannya ke dalam penjara.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Syu`ara' (26): 29.

قَالَ لِنِ أُنْخَذْتُ إِلَهِهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

“Musa berkata (pula): “Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu”.

Ketiga, pernyataan Fir`aun yang menyepelekan kelompok Bani Israil, sebagai kelompok minoritas dan lemah, menjadikannya tidak khawatir dengan keberadaan Bani Israil di negeri Mesir, sebaliknya menjadi pemicu baginya untuk kerap berlaku sewenang-wenang terhadap mereka.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Syu`ara' (26): 54

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

“(Fir`aun berkata): “Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil”

Itulah beberapa pernyataan Fir`aun selama kepemimpinannya yang diabadikan oleh kisah Al-Qur'an, sebuah pengabdian yang menguatkan sisi kediktatoran Fir`aun semasa kepemimpinannya. Dalam bentuk aksi kongkrit, Al-Qur'an pun mengabadikan sejumlah aksi kediktatoran Fir`aun yang ditujukan kepada siapapun yang mengambil sikap berlawanan dengannya, puncaknya adalah ketika Fir`aun bermimpi bahwasannya api besar keluar dari arah Baitul Maqdis kemudian menyambar dan membakar rumah-rumah di negeri Mesir, mimpi ini pun kemudian ditakwilkan bahwasannya akan lahir seorang lelaki dari kalangan Bani Israil, dimana kerajaan dan kekuasaan Fir`aun akan jatuh di tangannya.³⁰ Berangkat dari

³⁰ Abdullah Al Qurthubi, *Al Jâmi` Li Ahkâm Al Qur`ân*, Cairo: Dar Al Hadits, 2010 M, hal. 1/353.

takwil mimpi diatas, Fir'aun pun mengeluarkan maklumat agar semua anak lelaki yang terlahir dari kalangan Bani Israil untuk dibunuh, sedangkan anak perempuannya dibiarkan hidup.

Sebagaimana dalam Q.S. Al Qashash (28): 4.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Al-Razi dalam kitab *at-Tafsîr al-Kabîr* menyebutkan, membunuh setiap anak lelaki yang lahir dan membiarkan hidup anak perempuannya, merupakan sebuah *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa), dikarenakan kerusakan dan kesedihan yang luar biasa akan timbul dikarenakannya:

1. Pembunuhan setiap anak lelaki yang lahir, akan menghabisi kaum lelaki dari sebuah etnis, dan itu berarti sebuah tindakan *Genocide* (pemusnahan secara sistemik atas keberadaan sebuah etnis) secara tidak langsung.
2. Ketidakterdapatnya kaum lelaki dari sebuah etnis, akan berakibat buruk terhadap kemaslahatan kaum wanitanya, dikarenakan keberlangsungan hidup kaum wanita dalam sebuah etnis banyak bergantung kepada kaum lelakinya.
3. Pembunuhan terhadap anak lelaki yang lahir pasca proses kehamilan yang panjang dan melelahkan, merupakan bagian dari azab yang sangat menyakitkan.
4. Kerap kali kelahiran seorang anak lelaki lebih diharapkan oleh kedua orang tua dibandingkan dengan kelahiran anak perempuan.
5. Pembunuhan kaum wanita dan pemusnahan kaum lelaki dari sebuah etnis, akan menjadikan kaum wanita dari etnis tersebut menjadi target kejahatan seksual, sebuah puncak dari kehinaan yang dialami oleh sebuah etnis.³¹

³¹ Fakhruddin Ar Razi, *At Tafsîr Al Kabîr*, (Cairo: Dar Al Hadits, 2012 M), Hal. 2/80-81.

Ketegasan Kepemimpinan Nabi/Raja Sulaiman as

Bersikap tegas bagi seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan. Sikap tegas yang dimaksud adalah sikap moderat, diantara sikap otoriter dan sikap lembek. Sikap otoriter akan mendorong seseorang menjadi pemimpin yang diktator, dan kerap menindas pihak yang berseberangan dengannya. Sebaliknya sikap lembek akan menjadikannya sebagai pemimpin yang tidak berkarakter kuat, sehingga mudah diperalat oleh pihak jahat.³²

Nabi Sulaiman as merupakan sosok nabi dan raja dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini mengikis paham yang berupaya untuk melakukan dikotomi antara agama dan politik. Penyatuan tugas dalam diri seorang Sulaiman, sebagai seorang nabi dan raja, menguatkan fungsi diutusnya para nabi, yakni: Mengurusi kebutuhan umatnya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, tentunya termasuk: urusan penyelenggaraan sebuah pemerintahan.

Contoh kongkrit yang diabadikan oleh al-Qur'an dari ketegasan nabi Sulaiman as semasa kepemimpinannya, adalah ketegasan sikap yang diperlihatkan kepada internal bala tentaranya.

Dikisahkan dalam satu kesempatan, nabi Sulaiman as melakukan sidak terhadap pasukannya dari kalangan burung, ia pun tidak menemukan salah satu pasukannya yang bernama Hud Hud.³³ Maka ancaman pun diberikan kepada Hud Hud kalau ketidakberadaanya ini dikarenakan faktor ketidakdisiplinannya, kecuali kalau ia datang dengan membawa sebuah alasan yang kuat, yang dapat membenarkan dan mentolerir ketidakhadirannya saat itu. Dalam Q.S. Al Naml (27): 20-21:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ

“Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “mengapa aku tidak melihat Hud Hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.”

³² Ahmad Umar Hasyim, *Wasathiyah Al Islâm*, (Cairo: Dar Al Rasyad, 1998 M), Hal. 58.

³³ Burung Hud Hud adalah sejenis burung yang memiliki keistimewaan, antara lain dapat menemukan dari kejauhan tempat-tempat air di kedalaman tanah (Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbâh*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), Hal. 9/428).

Sikap tegas nabi Sulaiman as di atas atas pasukannya, patut ditiru dan dicontoh oleh para pemimpin sekarang, di saat banyak dari kalangan pegawai yang tidak memperhatikan aspek kedisiplinan kerja, lebih lagi di saat mereka melakukan tindakan kriminal yang dapat mencoreng bukan saja pribadi pegawai tersebut, melainkan juga institusi yang membawahnya.

Penutup

Kehidupan politik yang sangat dinamis pada abad modern ini, menuntut kita untuk mengkaji lebih mendalam seputar dimensi politik dalam kisah al-Qur'an, dikarenakan dimensi historis bukanlah satu-satunya dimensi yang terkandung dalam kisah al-Qur'an, sebagaimana dimensi historis bukanlah tujuan utama dari pemaparan kisah dalam al-Qur'an.

Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Diantara beberapa fenomena yang menguatkan akan hal ini dalam perspektif al-Qur'an adalah: *pertama*, Interaksi sejumlah nabi dengan para penguasa zamannya yang diabadikan dalam sejumlah ayat kisah dalam al-Qur'an. *Kedua*, Keberadaan sejumlah ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur hubungan antara rakyat dan penguasanya.

Atas dasar itulah, upaya dikotomi antara al-Qur'an dan politik, baik yang dilakukan oleh kalangan eksternal maupun internal umat Islam, tidak cukup kuat argumentasinya dihadapan argumentasi yang menguatkan fenomena keterkaitan antara al-Qur'an dan politik.

Egalitarianisme merupakan salah satu karakter penting yang dimiliki oleh politik Islam. Terlalu banyak ajaran Islam yang bermuara pada terwujudnya egalitarianisme, seperti: sikap Islam berkaitan dengan praktek perbudakan di muka bumi ini. Sedangkan Diktatorisme merupakan musuh kemanusiaan. Islam ketika mensyariatkan konsep musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahan, sejatinya Islam hendak memberangus segala bentuk praktek diktatorisme. Maka Bersikap tegas bagi seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan, dikarenakan kemandirian sebuah bangsa diantaranya ditentukan dengan ketegasan sikap pemimpinnya.

Demikian beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini, harapan besar agar supaya kajian seputar kontribusi kandungan kisah al-Qur'an yang berdimensi politik dapat digalakkan dan dikaji lebih mendalam lagi, guna kebaikan kita bersama sebagai anak

bangsa, dalam mengelola bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai bersama, amin.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Afandi, Rahman. *Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Insania, Vo. 18, No. 1, Januari-April 2013.

Anis, Ibrahim. *Al Mu`jam Al Wasîth*, Cairo: Majma` Al Lughah Al `Arabiyyah, t.th.

Hasyim, Ahmad Umar. *Wasathiyah Al Islâm*, Cairo: Dar Al Rasyad, 1998 M.

Huwaidi, Fahmi. *Al Qur`ân Wa Al Sulthân*, Cairo: Dar Al Syuruq, 1999 M.

Imarah, Muhammad. *Al Islâm Wa Al Siyâsah, Al Radd `Alâ Syubuhât Al `Ilmâniyyîn*, Cairo: Mathba`ah Al Azhar, 1992 M.

Imarah, Muhammad. *Naqd Kitâb Al Islâm Wa Ushûl Al Hukm Li Syaikh Al Islâm Muhammad Al Khidr Husain*, (Cairo: Dar Nahzhah, 1998 M).

Khayyath (Al), Abdul Aziz Izzat. *Al Nizhâm Al Siyâsî Fî Al Islâm*, Cairo: Dar Al Salam, 1999 M.

Marzuq, Abd Al Shobur. *Manhajiyah Al Taghyîr Al Ijtimâ`î*, Cairo: Dar Al Rasyad, 1998 M.

Qaradhawi (Al), Yusuf *Min Fiqh Al Daulah Fî Al Islâm*, (Cairo: Dar Al Syuruq, 1999).

Qurthubi (Al), Abdullah. *Al Jâmi` Li Ahkâm Al Qur`ân*, Cairo: Dar Al Hadits, 2010 M.

Razi (Al), Fakhruddin. *At Tafsîr Al Kabîr*, Cairo: Dar Al Hadits, 2012 M.

Shihab, Quraish. *Tafsîr Al Mishbâh*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.

Shobuni (Al), Muhammad Ali. *Shafwat Al Tafâsîr*, Cairo: Dar Al Shobuni, 1980 M.

Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syahibah, Muhammaad bin Muhammad Abu. *al-Isrâ`iliyyât Wa al-Maudhû`ât Fî Kutub al-Tafsîr*, Cairo, Maktabah al-Sunnah, 1408 H.

Syalabi, Ahmad. *Al Islâm*, Cairo: Maktabah An Nahzhah, 1997 M.

Website:

Ahmad, *Musnad Ahmad*, (<http://www.al-islam.com>)
Bukhari, *Shahîh Al Bukhârî*, (<http://www.al-islam.com>)
Muslim, *Shahîh Muslim*, (<http://www.al-islam.com>)
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diktator>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/politik>